



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GEDE ARYA SUGIARTHA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 64345

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/210 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 14.750 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 10.200 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 14.150 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **115.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI SPLASH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, DEASEL TAFT Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.196.018.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.455.749.213**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 5.566.767.213

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.566.767.213

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.